

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- _____. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- _____. *The Constituional Law of Indonesia*, Selangor: Sweet and Maxwell, 2009.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-undangan (1)*, Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Hamzah, M. Guntur. *Peradilan Modern*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Jellinek, Georg Jellinek *Allgemeine Staatslehre*, Berlin: Verlag von. O. Häring, 1914.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*, Tej. Max Knight, Clark: The Lawbook Exchange, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Montesquieu, Charles de Secondat, Baron de. *The Spirit of Laws*, Canada: Batoche Books, 1748/2001.
- Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi MA*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Para Pengajar Metode Penelitian Hukum Universitas Indonesia, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000.
- Ross, Alf. *On The Concepts State and State Organs in Constitutional Law*, Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law, 1961.
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jawa Timur: Setara Press, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.Ke-3, Jakarta: UI Press, 2008.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo, 2011.

Soemitro, Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2005.

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU RPJPN)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang MA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 Tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2012 Tentang hak
keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah MA.

Bolivia Constitutional.

Jurnal

Ahmad, Giri. “Pembatasan dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman dalam
Pemilihan Hakim Agung.”, Jurnal Yudisial, Vol. 7, No.3,
2014.

Canadian Judicial Council, “Ethical Principles for Judges.” Canadian
Judicial Council.

Douglas, James and Roger. “The Politics of Court Budgeting in the States:
Is Judicial Independence Threatened by the Budgetary
Process?”, American Society for Public Administration,
2003.

James and Jonathan, “Lord Acton and Employment Doctrines: Absolute Power and the Spread of At-Will Employment.”, *Journal of Business Ethics*, 2007.

Manan, Bagir. “Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggungjawab” dalam tim LeIP. *Andai Saya Terpilih: Janji-janji Calon Ketua dan Wakil Ketua MA*, 2002.

Refo, Patricia Lee. “Opening Statement: Pinching Pennies, Squeezing Justice: State Budget Cuts Threaten Judicial Independence.”, *American Bar Association*, Vol. 30, No. 1, 2003.

Susanto, Mei. “Kewenangan MK sebagai *Negative Budgeter* dalam Pengujian UU APBN.”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, 2017.

Viapiana, Federica. “Funding the Judiciary: How Budgeting System Shapes Justice”, *International Journal for Court Administration*, Vol. 10, Issue 1, Winter 2019.

Webb and Whittington, “Judicial Independence, the Power of the Pursue, and Inherent Judicial Powers.”, Vol.88, No. 1, 2004.

Internet

Asshiddiqie, Jimly. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1177>

[9#](#) (diakses pada 16 Februari 2022).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Ketua MA: Tidak Ada Tawar Menawar untuk Independensi Peradilan”,

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2325/ketua-ma-tidak-ada-tawar-menawar-untuk-independensi-peradilan>

(diakses pada 16 Februari 2022).

_____. “Regulasi Gaji Hakim Belum Jelas, Puslitbang MA Lakukan Penelitian”,

http://www.sinarpagibaru.id/berita/detail/Regulasi_Gaji_Hakim_Belum_Jelas_Puslitbang_MA_Lakukan_Penelitian

(diakses pada 28 Februari 2022).

_____. “Tugas Pokok dan Fungsi”.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> (diakses pada 16 Februari 2022).